BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan pada bab sebelumnya yang didasari dari data hasil pengamatan yang penulis lakukan pada saat melakukan Kerja Praktek di POLRESTABES Bandung, maka penulis mengambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Pajak adalah iuran dari rakyat kepada Negara didasari Undang-Undang yang bersifat memaksa tanpa jasa timbal balik yang digunakan untuk membiayai keperluan Negara. Pajak memungut penghasilan atau disebut pajak penghasilan pasal 21 (PPh21). PPh21 adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan, dan pembayaran lain yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa, dan kegiatan. Dalam pelaksanaannya penghitungan dan pemotongan PPh21 untuk PNS dan Polri yang bekerja di POLRESTABES Bandung sudah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku saat ini yaitu No. 36 tahun 2008. PPh21 untuk anggota PNS dan Polri ditanggung oleh Pemerintah dengan Dasar Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 262/PMK.03/2010 tentang tata cara pemotongan PPh21 untuk Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, anggota Polri, dan Pensiunannya atas Penghasilan yang Menjadi Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara atau Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

2. Ada beberapa kendala yang menghambat prosedur perhitungan PPh21 di POLRESTABES Bandung yaitu Sedikitnya anggota PNS dan Polri yang bekerja di Bagian Keuangan. Seluruh gaji anggota Polri se-Bandung Raya dihitung dan dipotong di Bagian Keuangan POLRESTABES Bandung yang mengakibatkan beberapa pekerjaan terbengkalai. Memindahkan rincian gaji dari DPP perbulan ke buku penghasilan perseorangan dengan cara ditulis tangan. Banyaknya buku penghasilan perseorangan yang harus diisi dengan cara ditulis tangan.

4.2. Saran

Dari hasil tinjauan penulis selama melaksanakan kerja praktek di POLRESTABES Bandung, penulis mempunyai saran yang akan disampaikan, yaitu :

1. Ada baiknya agar Pemerintah melakukan sosialisasi unntuk memperjelas lagi tentang tata cara pemotongan dan perhitungan PPh21 yang ditanggung oleh Pemerintah.
2. Proses perhitungan dan pemotongan PPh21 ada baiknya jika dihitung dan dipotong di setiap wilayah agar efesien dalam segi waktu dan tenaga. Meminta pemerintah membuatkan aplikasi untuk penulisan DPP agar tidak ditulis manual. Memperbanyak anggota PNS dan Polri yang ditempatkan di Bagian Keuangan untuk mempermudah pekerjaan yang ada.